



**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**SABTU, 12 MEI 2018**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

# BPK Mulai Audit Belanja APBD

## Kadis Dilarang "Plesiran"

**ARGA MAKMUR** - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu mulai datang ke Bengkulu Utara (BU), kemarin (11/5).

Kedatangan tim dari BPK tersebut diterima Bupati BU, Ir. Mian beserta jajaran pejabat utama Pemkab BU. Mereka akan melakukan audit tahunan terkait belanja APBD 2017 yang sudah berlalu.

Sekda BU, Dr. Haryadi, MM, M.Si menegaskan, seluruh bendahara baik bendahara OPD dan bendahara kegiatan wajib ada di OPD untuk menjelaskan terkait belanja OPD masing-masing.

Selain memang semua berkas dan bukti belanja wajib lengkap.

"Semua aturan belanja keuangan APBD sudah jelas. Silakan disesuaikan dengan aturan dan lengkapi. Jangan ada pertanggungjawaban yang tidak lengkap," terangnya.

Takhanya itu, Kepala Dinas (Kadis) juga dilarang melakukan perjalanan dinas atau "plesiran" ke luar kota jika memang tidak ada kepentingan yang mendesak dan ada izin khusus darinya. Kadis diwajibkan mendampingi BPK dalam melakukan audit dan berkoordinasi dengan masing-masing pelaksana kegiatan.

"Jangan sampai ada Kadis yang tidak ada di tempat. Karena yang berkomunikasi dengan bawahan adalah

kepala dinas. Kalau ada yang akan melakukan perjalanan wajib izin langsung dari saya atau Pak Bupati," tegasnya.

Pemkab BU menargetkan tahun ini mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Setelah tiga tahun belakangan ini hanya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Apalagi tahun ini ia merasa semua bendahara dan masing-masing kepala OPD sudah diberikan pelatihan khusus terkait pelaksanaan keuangan di masing-masing OPD.

"Kita menargetkan WTP, kita pasti bisa. Makanya jangan ada Kepala OPD yang berbuat macam-macam terkait pengelolaan keuangan ini," tegas Haryadi. (qia)